



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 015 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka untuk meningkatkan efektifitas dan mengurangi terpusatnya beban kerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, khususnya menyangkut pengelolaan belanja pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya;
  - menandatangani surat-surat bukti pembayaran/pengeluaran atas pelaksanaan anggaran;
  - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - menandatangani Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
  - bertanggungjawab atas seluruh anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya baik secara operasional maupun administrasi;
  - memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan belanja kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - mengadakan pemeriksaan kas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan belanja yang dikuasakan kepadanya;
  - melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan
  - mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan belanja yang dikuasakan kepadanya kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Camat pada masing-masing Kecamatan yang membawahi kelurahan.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- menyelesaikan Surat-surat tagihan/bukti pembayaran dan membayarkan keuangannya kepada Pihak yang berhak;
  - mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TU dan LS Barang dan Jasa kepada KPA melalui PPK-SKPD yang bersangkutan menurut kebutuhan pembiayaan yang diperlukan;
  - menyelenggarakan Penatausahaan Pengeluaran dari Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikuasakan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. secara administratif dan fungsional mempertanggungjawabkan penggunaan uang dengan membuat dan menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD dan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - e. bertanggungjawab atas seluruh keuangan Daerah yang diurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlah kas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kekeliruan; dan
  - f. memungut Pajak/Pungutan Sah lainnya yang merupakan penerimaan Negara/Daerah, apabila dalam melakukan pembayaran keuangan kepada pihak yang berhak diketahui bahwa pihak yang berhak tersebut dibebankan/diwajibkannya untuk itu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 015 /2021  
TANGGAL 4 Januari 2021

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN	
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Kecamatan Tanjung a. Kelurahan Jangkung	4.01.4.01.14.40.01 4.01.4.01.14.40.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MUHAMMAD JAHYANI, S.AP NIP. 19760322 199503 1 001 Lurah pada Kelurahan Jangkung	Hj. SUHARTINAH NIP. 19660421 198602 2 004 Staf Fungsional pada Kelurahan Jangkung		
				b. Kelurahan Agung	NOVI HARYADI, SE, KP NIP. 19850616 200904 1 002 Lurah pada Kelurahan Agung	Hj. EPRIANA SUSIATY, SE NIP. 19641101 199303 2 008 Staf Fungsional pada Kelurahan Agung	
				c. Kelurahan Hikun	RIFANI FADLI, SE, Kp NIP. 19840211 200801 1 007 Lurah pada Kelurahan Hikun	ANDERIE SOLIVAN, ST NIP. 19821027 200501 1 006 Kasi Pembangunan pada Kelurahan Hikun	
				d. Kelurahan Tanjung	H. ABDULLAH, SE NIP. 19640204 198701 1 003 Lurah pada Kelurahan Tanjung	MOKHAMMAD IBRAHIM NIP. 19731005 200701 1 019 Staf Fungsional pada Kelurahan Tanjung	
2	Kecamatan Murung Pudak a. Kelurahan Sulingan	4.01.4.01.14.40.01 4.01.4.01.14.40.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ABDUL MUTHALIB, S.Sos NIP. 19661013 198602 1 002 Lurah pada Kelurahan Sulingan	YETTY WALUYOWATI NIP. 19650223 198602 2 002 Staf Fungsional pada Kelurahan Sulingan		
				b. Kelurahan Belimbing Raya	H. Yoesfinoor, S.Sos NIP. 19671105 199303 1 006 Lurah pada Kelurahan Belimbing Raya	ROSWATI NIP. 19670505 198903 2 024 Staf Fungsional pada Kelurahan Belimbing Raya	
				c. Kelurahan Pembataan	MUHAMMAD RUANI, S.Pt NIP. 19730717 199604 1 004 Lurah pada Kelurahan Pembataan	AGOES NOOR ZAIN, A.Md NIP. 19830817 200501 1 004 Sekretaris Lurah pada Kelurahan Pembataan	

1	2	3	4	5	6	7
	d. Kelurahan Belimbing	4.01.4.01.14.40.01 4.01.4.01.14.40.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	RIKO HASTANTO NUGROHO, SE, Kp NIP. 19791125 201101 1 004 Lurah pada Kelurahan Belimbing	Hj. ZAM ZAMI, S, AP NIP. 19800805 200701 2 010 Kasi Kesra pada Kelurahan Belimbing	
	e. Kelurahan Mabun	4.01.4.01.14.40.01 4.01.4.01.14.40.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	RIZKY KURNIADI WIJAYA, S, Stp NIP. 19930114 201609 1 002 Lurah pada Kelurahan Mabun	DARMIN, S, AP NIP. 19710712 200701 1 025 Sekretaris Lurah pada Kelurahan Mabun	
3	Kecamatan Kelua a. Kelurahan Pulau	4.01.4.01.14.40.01 4.01.4.01.14.40.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	FAKHRUDDIN, S, Sos NIP. 19671110 198903 1 018 Lurah pada Kelurahan Pulau	SABIRIN MUHTAR NIP. 19690305 200701 1 030 Staf Fungsional pada Kelurahan Pulau	

BUPATI TABALONG, 

M. ANANG SYAKHFIANI 

